

**STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

(Studi Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH

ERIFAL F SASTRA

2017210055

KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

Erifal F. Sastra, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2021

STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(Studi Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau)

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sugeng Rusmiwari, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Nanang Bagus, S.Sos., M.AP

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk terciptanya *good governance*. Partisipasi masyarakat disetiap penyelenggaraan pemerintahan membawa pengaruh yang signifikan dalam proses menyukseskan proyek yang diprogramkan pemerintah. Program pemerintah akan gagal tanpa ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Untuk itu dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintah perlu ada inovasi baru atau strategi baru sehingga bisa mendorong semangat masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat merupakan pemilik kedaulatan maka dari itu keterlibatannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu wawancara Observasi lapangan dan dokumentasi untuk pengumpulan data, menganalisis data menggunakan Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Memberdayakan masyarakat, memberikan pendampingan, menyediakan ruang berpartisipasi bagi masyarakat, serta menjalin komunikasi yang intens dengan masyarakat merupakan rangkaian upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat terdapat faktor pendukung salah satunya ada rasa saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah, disamping faktor pendukung ada pula faktor penghambanya seperti, kurangnya kepercayaan diri masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan juga Desa Landungsari memiliki masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci : Strategi, Partisipasi, Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia sekarang ini mengalami perubahan besar di tingkat daerah dan desa yang mengutamakan peran serta masyarakat. Usaha meningkatkan keterlibatan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dibutuhkan perubahan kemampuan Pemerintah. Pemerintah harus bisa menciptakan gagasan baru, juga cara baru dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam Suryono (2004:79-80) Strategi membahas mengenai regulasi dalam pelaksanaan, dan menentukan tujuan yang akan dicapai, serta menentukan langkah-langkah penerapan sarana yang ada.

Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah berpengaruh pada relasi masyarakat dengan pemerintah. Dalam otonomi daerah terdapat sekema baru yang didalamnya termuat semangat mengikutsertakan masyarakat, dengan penekanan bahwa mutu otonomi daerah akan ditentukan dengan sejauh mana keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan, karena masyarakat merupakan pemilik kedaulatan.

Secara fungsional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintah dituntut untuk memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan agar lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat. Desa merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang berkoordinasi

langsung dengan masyarakat pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat. Desa mempunyai hak untuk mengatur kebutuhan masyarakat yang berpatokan pada berbagai bentuk partisipasi otonomi, demokrasi serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa mempunyai fungsi penting untuk mengelola kegiatan sosial yang ada di masyarakat, fungsi pokok yang dijalankan oleh pemerintah yaitu bagaimana mewujudkan keadilan, kebebasan juga melayani dengan baik agar bias mengarahkan masyarakat menuju kesejahteraan (Solekhan 2014:29).

Partisipasi adalah salah satu bagian penting dalam *governance*, oleh karena itu dalam upaya terciptanya *good governance*, banyak organisasi sosial dalam masyarakat menggunakan isu partisipasi sebagai langkah awal. Partisipasi diartikan sebagai bentuk keikutsertaan seseorang dengan sukarela tanpa ada paksaan dan jughah perintah. Partisipasi dapat diwujudkan melalui desentralisasi dan pembentukan pemerintah daerah. Secara legal, pemerintah daerah diadakan untuk dapat memberikan sarana berpartisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muluk 2009:71).

Kemampuan pemerintah merupakan salah satu unsur yang penting dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan bisa bekerjasama dengan pemerintah. Dengan demikian pendekatan baru serta teknis-teknis partisipasi dan keterbukaan pemerintah menjadi persyaratan yang tidak bias ditawarkan. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berkurangnya semangat

masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan besar saat ini. Karena pada dasarnya salah satu motivasi terciptanya *good governance* adalah keberadaan instansi masyarakat, yang dibuktikan dengan berkembangnya macam bentuk organisasi dan asosiasi yang mempunyai kapasitas, yang siap untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Solehkan 2014: 162).

Meningkatkan partisipasi masyarakat membutuhkan keseriusan dari semua pihak secara berkala dan memerlukan waktu relatif lama mungkin juga tidak terbatas. Mengingat, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus diawali dengan adanya saling percaya dan sikap solid, baik antara perorangan dalam masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Namun pencapaian kondisi saling percaya tidaklah mudah, tetapi diperlukan strategi agar membuat masyarakat lebih memahami kebijakan pemerintah yang didasarkan pada perinsip-perinsip saling melengkapi dan saling membutuhkan antar pemerintah dengan masyarakat.

1.2.Rumusan Masalah

Mengacu pada Latar Belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Strategi Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Dengan harapan penelitian ini bisa menjadi sumber, baik itu berupa data maupun informasi mengenai strategi dalam usaha menumbuh kembangkan peran serta warga terhadap program yang dijalankan oleh pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menambah referensi kajian mengenai pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan juga diharapkan menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*.
Tejemahan. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.
- Gustian, Jainal Anna. 2018. *Strategi Komunikasi Politik Pemerintah Daerah Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan. Journal Of Communication
Studies* Vol. 3 No. 1
- Jatmiko. 2003. *Manajemen Strategi*. UMM Malang
- Kehi, Mau Agustinus. 2019. *Upaya Pemerintah Memobilitas Partisipasi
Pembangunan Melalui Pendekatan Organisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik* Vol 8 No. 1
- Miki.Sabata Paulus, .2018 .*Strategi Pemerintah Desa Junrejo Untuk Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Pada Program Paving Jalan. Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik* Vol 6 No. 3
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.

- Muluk, Khairul. 2009. *Desentralisasi pemerintahan daerah*. Suabaya: ITS press
- Ndraha, Talizuduhu. 1990. *Pebangunanann Masyarakat*. Jakaarta: PT. Rineka Cipta
- Piranto, Agus. 2006. *Menaker Kualitas Pelayanan Publik*. Malang: In-Trans-Lembaga Studi untu Menguatan Masyarakat Transisi.
- Ripai, Andi. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi, untuknorganisasi publik dan organisasi non profit*. Jakarta: PT. Grahamedia Widasarana Indonesia.
- Siregar,I.2001. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Tesis, tidak dipublikasikan. Depok: Universitas Indonesia
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Suryono,Agus.2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, Sjamsir. 2007. *Etika Birokrasi& Auntabilitas Sektor Publik*. Malang : Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. Rajawali. Jakarta
- Undang-Undang RI No 6 tahun 2014. *Tentang Desa*. Bandung: Citra Ubala.

Widodo. 2001. *Good Governance (Telaah Dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.